



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

# LAPORAN KINERJA 2022

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG  
PURWAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Tugas, Fungsi, Visi, dan Misi KPKNL Purwakarta .....	3
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	5
C. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issue</i> ).....	6
1. Permasalahan di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.....	6
2. Permasalahan di Seksi Pengurusan Piutang Negara.....	8
3. Permasalahan di Seksi Pelayanan Penilaian.....	9
4. Permasalahan di Seksi Pelayanan Lelang.....	10
5. Permasalahan di Seksi Hukum dan Informasi.....	11
6. Permasalahan di Seksi Subbagian Umum.....	11
7. Permasalahan di Seksi Kepatuhan Internal.....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>13</b>
A. Rencana Strategis .....	13
B. Penetapan Kinerja .....	15
C. Addendum Kontrak Kinerja .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>20</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Analisis Kinerja.....	29
Masalah dalam pencapaian target	
Upaya yang telah dilakukan	
Rencana aksi	
C. Realisasi Anggaran.....	38
D. Inovasi .....	39
E. Penghargaan .....	42
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>43</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan menerapkan reformasi birokrasi sesuai amanat peraturan perundangan, memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

Mengingat sangat pentingnya peran tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, sebagai instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa (*stakeholder*), terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Di samping itu, upaya peningkatan pelayanan dan kinerja dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif sehingga terwujud pelayanan terbaik dan sikap kerja yang profesional, akuntabel, transparan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi sehingga dapat menjadi kantor pelayanan yang dibanggakan oleh masyarakat.

Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh KPKNL Purwakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja diantaranya melaksanakan secara konsisten berbagai kebijakan terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, KPKNL Purwakarta sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peranan KPKNL dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara.

#### **A. TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI KPKNL PURWAKARTA**

KPKNL Purwakarta yang beralamat di Jalan Siliwangi No 9 Kab. Purwakarta merupakan unit vertikal DJKN Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dalam rangka mendukung visi dan misi DJKN sebagai pengelolaan kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dengan total luas wilayah seluas 4.776,75 KM<sup>2</sup>. Stakeholder yang dilayani KPKNL Purwakarta yaitu

- Untuk Pengelolaan Kekayaan Negara sejumlah 92 satker
- Pelayanan Penilaian sejumlah 92 satker dan 3 pemerintah daerah
- Pelayanan Lelang kami melayani dari perbankan dan non perbankan termasuk pembeli lelang
- Piutang Negara kami mengurus piutang negara macet dari instansi pemerintah pusat dan daerah

KPKNL Purwakarta berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, maupun dalam melakukan pengamanan kekayaan negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara dan sertifikasi tanah pemerintah (Penertiban Barang Milik Negara). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Purwakarta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan guna mewujudkan reformasi birokrasi berkesinambungan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka memberikan arah, inspirasi, serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL Purwakarta memiliki visi dan misi sebagai berikut:

## VISI

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”.

## MISI

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam tatanan operasional, visi dan misi tersebut akan terus diupayakan untuk dicapai. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Purwakarta telah memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan motto **”BAIK”**.

**Bersih** : Bekerja dengan ikhlas, tanpa pamrih dalam melayani stakeholder.

**Akuntabel** : Hasil Kerja dapat dipertanggung jawabkan secara transparan sesuai dengan ketentuan.

**Inovatif** : Selalu menemukan cara baru dalam bekerja untuk menghadapi dinamika organisasi.

**Konsisten** : Bekerja dengan baik secara terus menerus dalam kondisi apapun.

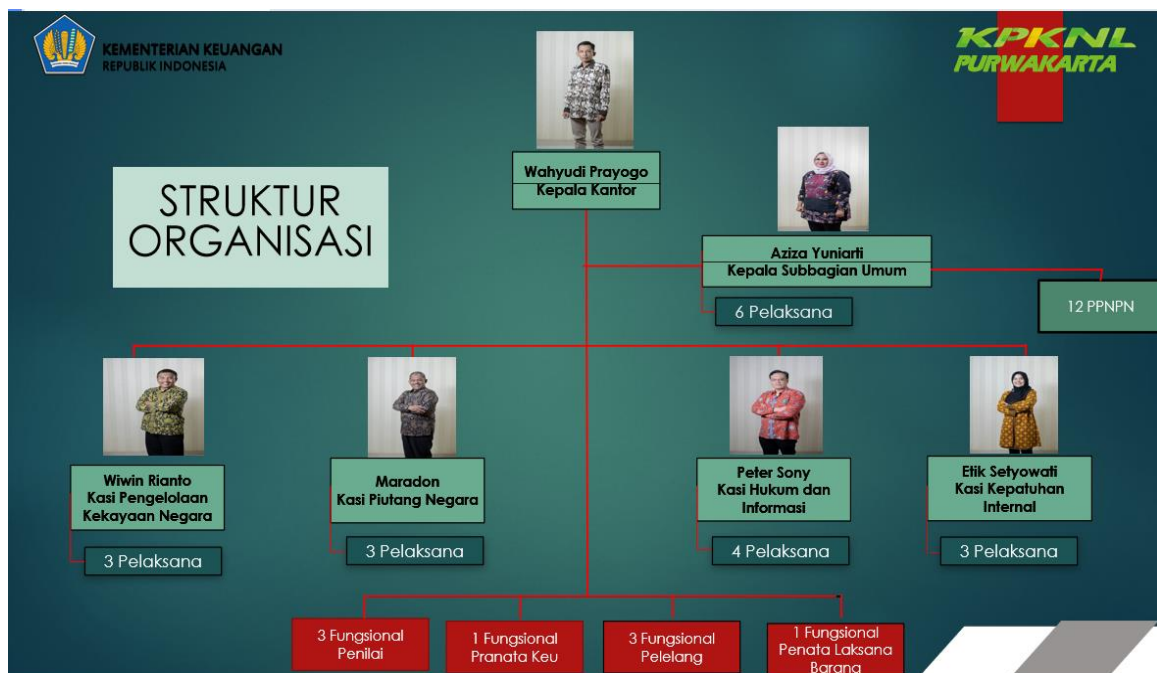
Melalui moto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Purwakarta dalam melaksanakan tugas bergerak bersama ke arah yang lebih baik dalam segala aspek sesuai Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Berdasarkan **Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**, KPKNL Purwakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Purwakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, Pengadministrasian, Pendayagunaan, Pengamanan Kekayaan Negara;
2. Registrasi, Verifikasi Dan Analisa Pertimbangan Permohonan Pengalihan Serta Penghapusan Kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
5. Pelaksanaan Pelayanan Penilaian;
6. Pelaksanaan Pelayanan Lelang;
7. Penyajian Informasi di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara Dan Lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran Piutang Negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

## B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi pada KPKNL Purwakarta adalah sebagai berikut :

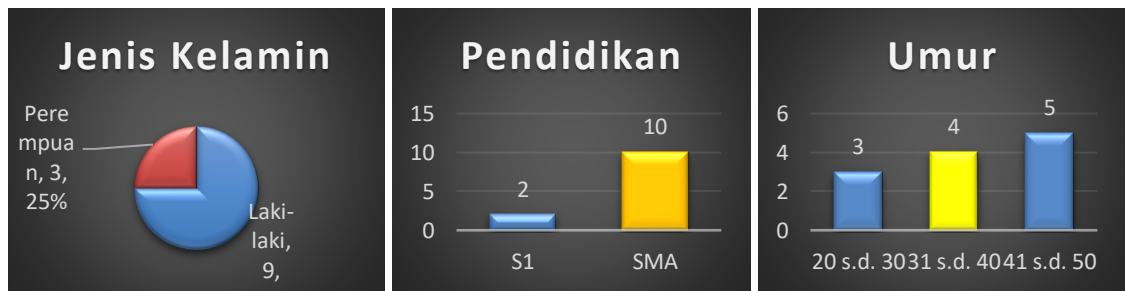


Rincian sumber daya manusia pada KPKNL Purwakarta adalah sebagai berikut:

A. ASN sebanyak 33 Pegawai



B. PPNPN sebanyak 12 pegawai



C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*business process*) untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, KPKNL Purwakarta mengalami beberapa kendala/permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

• **Triwulan I**

- PNBP BMN bulan Maret banyak dari penjualan barang rampasan/tegahan.
- Bidang tanah yang disertifikatkan belum dilakukan pemberkasan dikarenakan Satker masih menyiapkan dokumen yang diperlukan dan Satker masih kordinasi dengan kantah untuk menentukan jadwal pengukuran.
- Portofolio aset masih proses verifikasi data survey dan menunggu data sekunder dari BPS.

• **Triwulan II**

- PNBP BMN Q2 berasal dari Penjualan BMN, Pemanfaatan BMN, dan penjualan barang rampasan/tegahan.
- Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK beberapa Satker belum menyampaikan dan melengkapi dokumen form pendataan.
- Portofolio aset survei dan perhitungan telah dilakukan, masih tersisa sebanyak 29 NUP dari total target.
- Ada persetujuan pemanfaatan yang tidak ditindaklanjuti karena dianggap terlalu tinggi nilai sewanya.
- Ada satker yang belum memahami tata cara pengajuan lelang BMN secara online sehingga persetujuan yang sudah diterbitkan tidak ditindaklanjuti.

- **Triwulan III**

- a. Potensi pemanfaatan BMN terbatas dan beberapa persetujuan belum ditindaklanjuti.
- b. Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Beberapa satker belum menyampaikan dan melengkapi dokumen form pendataan, terdapat beberapa nup yang perlu dilakukan reklasifikasi sehingga tidak menjadi objek SBSK, terdapat banyak BMN berupa rumah negara dalam tidak berpenghuni/dihuni tidak sesuai dengan ketentuan.
- c. Pada bulan September 2022 baru keluar perubahan Penlok, Satker pengganti baru melengkapi dokumen seperti KSOP Patimban (8 bidang), Satker DJKA sudah dilakukan pengukuran dari 7 bidang pengganti.
- d. Satker Lanud Suryadarma dengan target BBSK sebanyak 22 NUP, baru tahap proses melengkapi dokumen persyaratan sesuai permintaan Kantah.
- e. Satker PJN1 dengan target BBSK sebanyak 15 NUP, baru tahap proses permohonan SHP asli ada di Kantor Pusatnya.
- f. Portofolio aset survei dan perhitungan telah dilakukan, masih tersisa sebanyak 12 NUP yang akan dilakukan perhitungan evaluasi kinerja BMN. Sebanyak 50 NUP belum diterbitkan rekomendasi.

- **Triwulan IV**

- a. Potensi pemanfaatan BMN terbatas dan beberapa persetujuan pengelolaan BMN belum ditindaklanjuti.
- b. Terdapat beberapa nup yang dilakukan reklasifikasi sehingga tidak menjadi objek SBSK
- c. Terdapat banyak BMN berupa rumah negara dalam kondisi tidak berpenghuni/dihuni tidak sesuai dengan ketentuan.
- d. Terdapat perubahan Penetapan Lokasi yang menyebabkan tidak semua bidang tanah pada Satuan Kerja KSOP Kelas II Patimban dapat dilaksanakan pada tahun 2022, karena terkendala ketersediaan dana pada Kantor Pertanahan. Atas sisa bidang tanah tersebut akan menjadi target tahun 2023.

## **2. Permasalahan pada Seksi Piutang Negara**

Dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara masih terdapat beberapa permasalahan di Seksi Piutang Negara, antara lain:

- **Triwulan I**

- a. Target penurunan outstanding piutang negara adalah penurunan nilai outstanding piutang negara yang sebagian besar merupakan BKPN yang tidak potensial (debitur mampu namun tidak mengakui hutang, BKPN dengan barang jaminan yang tidak ada pengikatan atau BKPN yang didukung dengan barang jaminan

- milik pihak ketiga serta barang jaminan yang belum diketahui kejelasan dokumen kepemilikannya).
- b. 2. Pandemi yang belum berakhir menyebabkan kegiatan pengurusan piutang negara tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
  - c. BKPN yang diurus sebagian besar merupakan BKPN yang tidak potensial (debitur mampu namun tidak mengakui hutang, BKPN dengan barang jaminan yang tidak ada pengikatan atau BKPN yang didukung dengan barang jaminan milik pihak ketiga serta barang jaminan yang belum diketahui kejelasan dokumen kepemilikannya).
  - d. Pandemi yang belum berakhir menyebabkan kegiatan pengurusan piutang negara tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- **Triwulan II**
    - a. Sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang didukung dengan barang jaminan yang tidak potensial (tidak marketable, barang jaminan milik Pihak Ke-3 maupun barang jaminan yang sudah diperjualbelikan).
    - b. Kemampuan dari Penanggung Hutang sangat rendah.
    - c. Penanggung Hutang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang karena merasa bukan hutang pribadi maupun merasa sudah menyelesaikan hutangnya.
  - **Triwulan III**
    - a. Rendahnya tingkat kemampuan Penanggung Hutang untuk melunasi hutangi, barang jaminan tidak potensial/tidak ditemukan, debitur tidak ditemukan.
    - b. Rendahnya tingkat kemampuan Penanggung Hutang untuk melunasi hutangi, barang jaminan tidak potensial/tidak ditemukan, debitur tidak ditemukan.
    - c. Sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang didukung dengan barang jaminan yang tidak potensial (tidak marketable, barang jaminan milik Pihak Ke-3 maupun barang jaminan yang sudah diperjualbelikan).
    - d. Kemampuan dari Penanggung Hutang sangat rendah.
    - e. Penanggung Hutang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang karena merasa bukan hutang pribadi maupun merasa sudah menyelesaikan hutangnya.
  - **Triwulan IV**
    - a. Penanggung Hutang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang.
    - b. Tingkat kemampuan Penanggung Hutang yang rendah sehingga mempengaruhi potensi penerimaan PNBPN.
    - c. Target penurunan outstanding piutang negara adalah penurunan nilai outstanding piutang negara yang sebagian besar merupakan BKPN dimana Penanggung Hutang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang serta tingkat kemampuan Penanggung Hutang yang rendah.

### 3. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Penilaian

Dalam pelaksanaan proses penilaian masih terdapat beberapa permasalahan di Seksi Penilaian, antara lain:

- **Triwulan I**
  - a. Selama Triwulan I 2022 hanya ada 1 hasil penilaian yang terjadi deviasi yang disebabkan karena nilai limit yang diajukan oleh pemohon lebih besar jika dibandingkan dengan nilai wajar hasil penilaian
- **Triwulan II**
  - a. Selama Triwulan II 2022 hanya ada 1 hasil penilaian yang terjadi deviasi yang disebabkan karena nilai limit yang diajukan oleh pemohon lebih besar jika dibandingkan dengan nilai wajar hasil penilaian.
- **Triwulan III**
  - a. Selama Triwulan III 2022 ada 2 hasil penilaian yang terjadi deviasi yang disebabkan karena nilai limit yang diajukan oleh pemohon lebih besar jika dibandingkan dengan nilai wajar hasil penilaian.
- **Triwulan IV**
  -

### 4. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Lelang

Dalam pelaksanaan pelayanan lelang masih terdapat beberapa Permasalahan di Seksi Pelayanan Lelang, antara lain:

- **Triwulan I**
  - a. Adanya lelang eksekusi Pailit yang laku dengan nilai pokok lelang cukup besar sehingga menghasilkan PNBPN yang cukup besar pula.
  - b. Banyaknya lelang TAP.
  - c. Beberapa permohonan lelang masih ada yang meminta lelang konvensional sehingga lelang menjadi kurang optimal (lelang hasil kayu dari tangan pertama).
- **Triwulan II**
  - a. PNBPN Lelang Q2 berasal dari bea lelang pembeli, penjual, permohonan lelang, batal, dan wanprestasi. Sebagian besar berasal dari lelang eksekusi hak tanggungan, namun ada juga dari lelang non eksekusi wajib BMN, BMD, rampasan kejaksaan, dan non eksekusi sukarela.
  - b. Banyaknya lelang TAP.
- **Triwulan III**
  - a. PNBPN Lelang Q3 berasal dari bea lelang pembeli, penjual, permohonan lelang, batal, dan wanprestasi. Sebagian besar berasal dari lelang eksekusi hak tanggungan, namun ada juga dari lelang non eksekusi wajib BMN, BMD, rampasan kejaksaan, dan non eksekusi sukarela.
  - b. Banyaknya lelang TAP.

- c. Banyaknya obyek lelang yang kurang marketable.
- d. Adanya Obyek lelang yang masih dihuni oleh debitur.
- e. Adanya lelang eksekusi pailit dengan nilai cukup besar yang laku di Triwulan I.
- f. Adanya lelang kayu perhutani yang secara aturan masih diperbolehkan dilakukan secara konvensional.

- **Triwulan IV**

- a. Kondisi ekonomi yang belum stabil, dan adanya beberapa obyek lelang yang masih dihuni oleh debitur menjadi salah satu penyebab masih banyaknya lelang TAP.
- b. Kebijakan pemohon lelang terkait penurunan nilai limit dimana memerlukan beberapa kali lelang untuk sampai pada nilai likuidasi.
- c. Beberapa obyek lelang yang masih dihuni oleh debitur menyebabkan calon pembeli memerlukan biaya dan waktu lebih apabila menjadi pemenang lelang terkait pengosongannya.
- d. Banyaknya lelang TAP.
- e. Banyaknya obyek lelang yang kurang marketable.

## **5. Permasalahan pada Seksi Hukum dan Informasi**

Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Hukum dan Informasi secara umum, sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengembalian uang jaminan lelang, masih terdapat peserta lelang mencantumkan nomor rekening dan nama Bank yang salah, sehingga menghambat Bendahara Penerima dalam pengembalian tepat waktu dan akhirnya terjadi miskomunikasi antara peserta lelang tersebut dengan Bendahara Penerima, selain itu masih terdapat beberapa peserta lelang yang tidak mencantumkan nomor telepon sehingga apabila terdapat kendala dalam pengembalian uang jaminan lelang tidak bisa melakukan konfirmasi ke peserta lelang yang bersangkutan.
- b. Untuk jangka waktu pengembalian uang jaminan lelang SOP satu hari, beberapa peserta lelang menganggap bahwa pengembalian itu di hari yang sama dengan hari pelaksanaan lelang. selain itu bagi peserta lelang yang berbeda bank persepsi untuk pengembalian uang jaminan lelang akan terproses lebih lama dibanding dengan yang bank persepsi nya sama dengan bank persepsi yang digunakan oleh KPKNL namun peserta lelang kadang masih menganggap Bendahara Penerima menghambat proses pengembalian uang jaminan tersebut.
- c. Sarana dan prasarana dokumentasi perlu penambahan.
- d. Banyak gugatan perkara yang ditujukan/diterima KPKNL Purwakarta, namun Anggaran DIPA Penanganan Perkara terbatas.

## 6. Permasalahan pada Subbagian Umum

Permasalahan yang kerap terjadi pada Sub Bagian Umum, sebagai berikut:

- **Triwulan I**
  - a. Seluruh pegawai telah memberikan perhatian dan mengikuti berbagai jenis program pengembangam kompetensi, namun tidak semua Program menyediakan JP yang tinggi. Akan tetapi diperkirakan dalam jangka waktu 1 tahun, seluruh pegawai akan mencapai paling sedikit 24 JP dan sesuai kriteria sebagaimana yang direncanakan.
  - b. Adanya perubahan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - c. Adanya kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat, seperti penanganan pandemi COVID yang membutuhkan dana lebih.
  - d. Adanya perubahan reformulasi IKU PKPA.
  - e. Rendahnya awareness dari seksi tentang IKU PKPA.
  - f. Penetapan target triwulanan IKU yang kurang tepat, diperlukan adanya adendum target IKU.
- **Triwulan II**

-
- **Triwulan III**
  - a. Belum ada aplikasi monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi.
  - b. Informasi pelatihan yang terdapat di aplikasi SEMANTIK hanya dapat diakses oleh Pegawai yang bersangkutan.
  - c. Pemahaman pegawai terkait tema FGD masih rendah.
  - d. Adanya perubahan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - e. Kebijakan Pemerintah yang mungkin akan diterapkan, sehubungan dengan proses pemulihan pasca pandemi, resesi, dsb.
  - f. Formula perhitungan IKPA dan SMART sub Realisasi Anggaran dan efisiensi yang kontradiktif.
  - g. Kurangnya dana pada output PN dan Bankum, dikarenakan banyaknya perkara dan sulitnya penyelesaian PN.
- **Triwulan IV**
  - a. Belum ada aplikasi monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi.
  - b. Informasi pelatihan di aplikasi SEMANTIK hanya dapat diakses oleh Pegawai yang bersangkutan.
  - c. Aplikasi SIMAN dan SAKTI, maupun E-Prime Aset yang menjadi sumber utama bahan pelaporan masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga pelaporan dimungkinkan terlambat.

- d. Perpindahan BMN dari beberapa ruangan tidak dilaporkan terlebih dahulu oleh pegawai.
- e. Volume/intensitas yang tinggi para Penilai mengakibatkan permohonan penilaian BMN untuk penghapusan tertunda.
- f. Ditemukan BMN berupa inventaris kantor yang belum sesuai dengan penandaannya.
- g. Adanya peraturan yang tidak mengizinkan munculnya biaya pemeliharaan atas tanah untuk rumah negara.

## **7. Permasalahan pada Seksi Kepatuhan Internal**

Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Kepatuhan Internal secara umum ialah adanya peraturan dan pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pada Seksi Kepatuhan Internal yang sering mengalami perubahan dari Kantor Pusat DJKN, sehingga diperlukan penyesuaian dalam penerapannya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pelaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022, telah disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Purwakarta Tahun 2022 yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

#### **A. Rencana Strategis**

##### **1. Misi**

Misi KPKNL Purwakarta adalah :

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik administrasi dan hukum.
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna.

##### **2. Tujuan**

KPKNL Purwakarta mempunyai tujuan organisasi yakni mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggungjawab, profesional dan dipercaya masyarakat pengguna jasa di wilayah kerja KPKNL Purwakarta.

##### **3. Sasaran**

Sasaran yang hendak dituju KPKNL Purwakarta adalah :

- 1) Perwujudan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- 2) Pengamanan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
- 3) Perwujudan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- 4) Pelaksanaan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 5) Perwujudan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna, efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif.

#### 4. Kebijakan

Kebijakan adalah implementasi dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kebijakan-kebijakan KPKNL Purwakarta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pekerjaan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan monitoring pelaksanaan diklat wajib, mengajukan diklat yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*.
- 3) Menerapkan standarisasi kerja yang berbasis pada integritas, ketulusan dan komitmen.
- 4) Menerapkan percepatan proses di bidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian.
- 5) Menerapkan sistem aplikasi dibidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian yang berbasis pada teknologi informasi.
- 6) Meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan informasi yang meliputi percepatan proses penyelesaian perkara di pengadilan (litigasi) dan pemberian keterangan atau informasi kepada pihak terkait.

#### 5. Program Kerja

Program kerja yang ditetapkan KPKNL Purwakarta tidak terlepas dari kebijakan yang telah diambil dan menjadi acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Program kerja KPKNL Purwakarta meliputi program kerja yang terurai kedalam program kerja masing-masing unit kerja. Berikut Program Kerja KPKNL Purwakarta :

##### 1) Pelayanan di bidang Lelang

- a) Memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa lelang;
- b) Memberikan konsultasi kepada *stakeholder* tentang peraturan, syarat dan prosedur lelang;
- c) Melaksanakan lelang online secara optimal;
- d) Mempercepat proses penyelesaian Risaiah Lelang baik minuta, kutipan maupun salinan tepat waktu;
- e) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemohon lelang;
- f) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

##### 2) Pelayanan di Bidang Pengurusan Piutang Negara

- a) Mempercepat proses pengurusan Piutang Negara untuk berkas kasus Piutang Negara yang baru diserahkan;
- b) Melakukan kegiatan bersifat persuatif guna menggugah kesadaran debitur agar mau mengangsur hutang mengingat kegiatan eksekusi sudah tidak dapat dilakukan;

- c) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan penyerah piutang;
- d) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

### **3) Pelayanan di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara**

- a) Memberikan pelayanan prima dengan memberikan pengarahan dan perbantuan optimal dalam implementasi program SIMAN;
- b) Mempercepat proses permohonan utilisasi dengan tidak mengurangi kecermatan dan kelengkapan berkas permohonan;
- c) Mengelola kekayaan negara dengan efektif dan efisien;
- d) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

### **4) Pelayanan di Bidang Penilaian**

- a) Mempercepat proses permohonan penilaian baik penilaian BMN maupun penilaian barang jaminan hutang dengan tepat waktu dan berkualitas;
- b) Menyelesaikan penilaian kembali (revaluasi).
- c) Menyusun database penilaian guna mendukung informasi penilaian yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan;
- d) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

### **5) Pelayanan di Bidang Hukum dan Informasi**

- a) Memberikan pelayanan yang optimal dalam setiap permohonan verifikasi jumlah hutang dalam rangka penerbitan SPPNS, SPPNL dan PSBDT;
- b) Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan layanan hukum yang efektif;
- c) Memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi;
- d) Menerapkan aplikasi Sibankum;
- e) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

### **6) Pelayanan di Bidang Umum**

- a) Memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh unit kerja KPKNL Purwakarta dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara maksimal;
- b) Memberikan dorongan pembentukan SDM yang berintegrasi dan berkompotensi tinggi;
- c) Mengelola anggaran dengan optimal;
- d) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

## **B. Penetapan Kinerja**

### **1. Perjanjian Kinerja**

Mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggung jawab, profesional dan dipercaya masyarakat di wilayah kerja KPKNL Purwakarta merupakan misi KPKNL Purwakarta. Untuk mewujudkan misi tersebut, dibuatlah perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat selaku pejabat tertinggi di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat dengan Kepala KPKNL

Purwakarta. Dalam perjanjian kinerja tersebut memuat butir-butir yang telah ditetapkan dalam garis besar peta strategi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yaitu :

- 1). Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;
- 2). Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
- 3). Kepuasan Pengguna Layananyang Tinggi;
- 4). Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
- 5). Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
- 6). Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
- 7). Edukasi yang Efektif;
- 8). Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
- 9). SDM yang Kompeten;
- 10). Organisasi yang Fit For Purpose;
- 11). Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal;

## **2. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Purwakarta :

1. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
2. Persentase produktivitas lelang
3. Persentase Realisasi Pokok Lelang
4. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
5. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL
6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
7. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan
8. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
9. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
10. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
11. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction
12. Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN
13. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
14. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara
15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
16. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK
17. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja
18. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
20. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**PURWAKARTA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	20,21%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	36%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	24,4%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	75%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,55
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	80%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	75%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	90%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10.	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		10b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN	100%

Kegiatan	Anggaran
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	Rp225.181.598,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp5.642.000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	-
3. Pengelolaan Aset	Rp219.539.598,00
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
<b>Dukungan Manajemen</b>	Rp1.171.582.533,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp8.107.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.152.635.533,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp6.640.000,00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp4.200.000,00
6. Pengelolaan Sistem Informasi dan teknologi	-

Bandung, 13 April 2022

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tavianto Noegroho

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Purwakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wahjudi Prajogo

### C. Addendum Kontrak Kinerja



1. Target PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dan Pokok Lelang tahun 2022 dengan nilai

PNBP BMN	: Rp. 6,300,000,000,00
PNBP Lelang	: Rp. 11.600.000.000,00
PNBP Piutang Negara	: Rp. 13,450,000,00
<b>Total PNBPN</b>	<b>: Rp 17.913.450.000,00</b>

Dari total target PNBPN tersebut diatas telah sudah tercapai di semester 1 tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 20.175.262.270,00, dengan kontribusi terbesar dari PNBPN lelang. Karena target PNBPN tahunan 2022 sudah tercapai di semester I maka dilakukan addendum kontrak kinerja terkait Target PNBPN khususnya PNBPN Lelang, adapun rincian addendum adalah sebagai berikut:

PNBP BMN	: Rp. 6,300,000,000,00
PNBP Lelang	: Rp. 18,305,000,000,00
PNBP Piutang Negara	: Rp. 13,450,000,00
<b>Total PNBPN</b>	<b>: Rp 24,618,450,000,00</b>

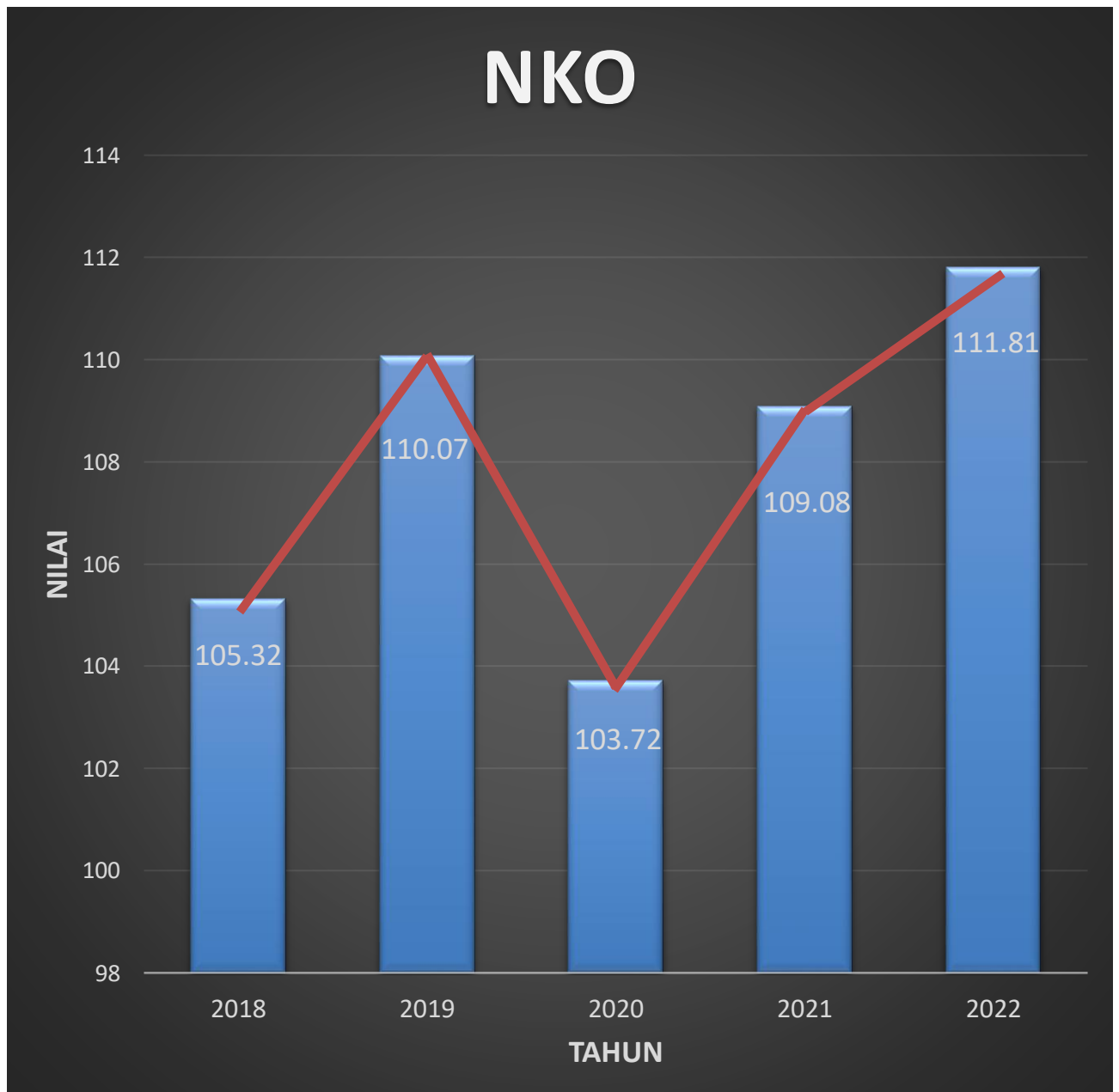
2. Target Pokok Lelang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 256.500.000.000,00 dan telah tercapai pada semester 1 tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 351.526.029.661,00. Karena target Pokok Lelang sudah tercpai di semester 1 maka dilakukan addendum kontrak kinerja terkait target Pokok Lelang menjadi sebesar Rp. 402,500.000.000,00

ADENDUM KONTRAK KINERJA NOMOR: 10A/KN.20/2022			
Pada hari ini telah disepakati addendum atas Kontrak Kinerja Nomor: 10/KN.20/2022 tanggal 31 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:			
A. Perubahan Manual IKU			
Kode IKU	IKU	Sebelum	Menjadi
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Raw Data Target PNBPN Lelang Rp11.600.000.000,00. Total Raw Data Target Rp17.913.450.000,00.	Raw Data Target PNBPN Lelang Rp18.305.000.000,00. Total Raw Data Target Rp24.618.450.000,00.
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Raw Data Target Pokok Lelang Rp256.500.000.000,00.	Raw Data Target Pokok Lelang Rp402.500.000.000,00.
Bandung, Juli 2022			
Menyetujui, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat  Tavianto Noegroho		Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta  Wahjudi Frajogo	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian Kinerja KPKNL Purwakarta yang dituangkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. capaian pada 2022 sebesar 111,811 % sebelumnya tahun 2021 109,08. Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi dalam 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:



Pada Tahun Anggaran 2022, secara umum KPKNL Purwakarta telah mencapai target yang ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **111,81%**. Lebih jelasnya dibawah ini adalah gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2022:

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							27,49%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							109,96%	
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	112,13%	14%	50%	112,13%	112,13%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	38,80%	14%	50%	107,79%	107,79%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,59%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116,33%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	112,65%	14%	50%	112,65%	112,65%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	235,28%	14%	50%	235,28%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							104,84%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,55	4,77	21%	100%	104,84%	104,84%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33,06%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							115,17%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	79,68%	14%	24%	122,581%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	419%	19%	33%	419,35%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	100,00%	14%	24%	100,00%	100,00%	hijau
4d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	124,59%	11%	19%	124,59%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,47%	14%	100%	197,53%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,01%	
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	99,38%	14%	50%	108,02%	108,02%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	10,0%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							102,43%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90	92,19	14%	100%	102,43%	102,43%	hijau
8	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							107,14%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	91,07%	14%	100%	107,14%	107,14%	hijau

Learning & Growth Perspective (30%)								34,67%	
9	SDM yang kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang fit for purpose							116,64%	
10a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	75	92,44	14%	33%	123,25%	120,00%	hijau
10b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	80	97,11	14%	33%	121,39%	120,00%	hijau
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	98,92	14%	33%	109,91%	109,91%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							110,09%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,67%	14%	50%	100,18%	100,18%	hijau
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	140,00%	14%	50%	140,00%	120,00%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>111,81%</b>	<b>hijau</b>

## 1. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun 2022 sebesar **Rp. 24.618.450.000,-** dengan persentase 100%. Dari target tersebut dapat direalisasikan sebesar **Rp. 27.605.084.427,-** atau sebesar **112.13%**. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian IKU Tahun 2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian
1.	PNBP Pengelolaan Negara	Rp. 6.300.000.000,-	Rp. 7.198.866.440,-	114,27%
2.	PNBP Piutang Negara	Rp. 13.450.000,-	Rp. 13.054.697,-	97,06%
3.	PNBP Lelang	Rp. 18.305.000.000,-	Rp. 20.393.163.290,-	111,41%
	<b>Total</b>	<b>Rp. 24.618.450.000,-</b>	<b>Rp. 27.605.084.427,-</b>	<b>112,13%</b>

## 2. Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Target persentase produktivitas lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2022 sebesar **36 %**. Dari target tersebut, diperoleh realisasi sebesar **38,80 %** dengan persentase capaian **107,79 %**.

### 3. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Target Pokok Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2022 secara keseluruhan ditetapkan sebesar **Rp. 402.500.000.000,-**. Dari target tersebut, dapat direalisasikan sebesar **Rp. 453.432.212.088,-** atau **112,65%**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian IKU Tahun 2022	Target IKU Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian
<b>Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)</b>	<b>Rp. 402.500.000.000,-</b>	<b>Rp. 453.432.212.088,-</b>	<b>112,65%</b>
Pokok Lelang Kelas I	Rp. 339.500.000.000,-	Rp. 366.990.173.388,-	108,10%
Pokok Lelang Pegadaian	Rp. 63.000.000.000,-	Rp. 86.442.038.700,-	137,21%

### 4. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Target persentase penurunan outstanding piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun 2022 sebesar **Rp. 301.700.000,-**. Dari target tersebut dapat direalisasikan penurunan outstanding piutang Negara sebesar **Rp. 709.839.418,-** dengan persentase nilai realisasi **235,28 %**.

### 5. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

Target indeks kepuasan pengguna layanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta menetapkan Indeks Kepuasan Layanan pada tahun 2022 **4,55**. Dari target tersebut, dapat direalisasikan **4,77** dengan persentase capaian **104.84%** setiap seksi yang di seksi teknis menyebarkan kuesioner kepada pengguna jasa /Satuan Kerja K/L.

### 6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan. Terdapat perubahan target tahunan jumlah NUP perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2022 yang semula 538 NUP menjadi 534 NUP.

Target Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2022 KPKNL Purwakarta sebesar **65%**, dengan nilai tingkat kesesuaian sebesar **79,69%**, dengan persentase capaian **122,581%**.

## **7. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan**

Target persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2022 sebesar **100%** (sebanyak **93** bidang tanah yang disertipikatkan). Dari target tersebut, dapat direalisasikan **419.35 %** dengan capaian sebanyak **390** bidang tanah yang telah disertifikatkan.

## **8. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)**

Target persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2022 sebesar **100%** (sebanyak **30** BKPN yang telah dinyatakan selesai). Dari target tersebut, dapat direalisasikan **100%** (sebanyak **30** BKPN yang telah dinyatakan selesai).

## **9. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Target persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2022 sebesar **100%** dengan target **50** aset yang akan dievaluasi dan target yang direkomendasikan sebanyak **170** aset. Dari target tersebut, dapat direalisasikan sebesar **106,41%** (sebanyak **69** aset yang dievaluasi kinerjanya dan **189** aset yang direkomendasikan), dengan persentase capaian **124,59%**.

## **10. Deviasi Ketergantungan Hasil Penilaian**

Deviasi ketergantungan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Target deviasi ketergantungan nilai penilaian pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2022 sebesar **19%**. Dari target tersebut, diperoleh capaian deviasi ketergantungan hasil penilaian sebesar **0.47%** dengan persentase capaian **120%**.

## **11. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction**

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Target pelaksanaan e-Auction dan e-Conventional Auction pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2022 adalah sebesar **92%** dari realisasi frekuensi lelang dan dapat direalisasikan sebesar **99,38%** dari frekuensi lelang dengan persentase capaian **108,02%**.

## **12. Deviasi Data PNBPFungsional DJKN**

Target IKU Deviasi Data PNBPFungsional DJKN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2022 sebesar **10%**. Dari target tersebut, diperoleh capaian deviasi data PNBPFungsional DJKN sebesar **0%** dengan persentase capaian **120%**.

## **13. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi**

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2022 ditetapkan sebesar **90**, dapat direalisasikan sebesar **92,19** dengan capaian **102,43%**.

## **14. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara**

IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku

pengelola barang. Target persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2022 ditetapkan sebesar **85%**, dapat direalisasikan sebesar **91,07%** dengan capaian **107,14%**.

#### **15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai**

Kegiatan pelatihan dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai. Pengajuan diklat pegawai disesuaikan dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*. Target persentase pengembangan kompetensi pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2022 ditetapkan sebesar **100%**. Dapat direalisasikan sebesar **120%**.

#### **16. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK**

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16.

Nilai Pemenuhan = Nilai akhir (total Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil) berdasarkan hasil penilaian TPK. Realisasi nilai capaian sebesar **92,44** dari target **75**, dengan persentase capaian **123.25%**.

#### **17. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja**

IKU ini bertujuan untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang. Realisasi capaian berasal dari hasil penilaian Kantor Wilayah atas pengelolaan kinerja. Penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja.

Target IKU Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2022 sebesar **80**. Dari target tersebut, diperoleh capaian nilai sebesar **97.11**, dengan persentase capaian **120%**.

#### **18. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator**

Merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Target indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2022 ditetapkan sebesar **90**. Dapat direalisasikan sebesar **98.92**, dengan capaian sebesar **109.91%**.

#### **19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu **capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto**, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu **penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM**. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses. Target Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2022 ditetapkan **95,5%**. Dapat direalisasikan sebesar **95,67%**, dengan capaian **100,18%**.

#### **20. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**

IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Target IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2022 sebesar **100%**, dapat direalisasikan sebesar **140%** dengan persentase capaian **120%**.

Perbandingan rincian capaian PNB, Pokok Lelang, Pengurusan Piutang Negara KPKNL Purwakarta Tahun 2022 dengan capaian kinerja sebelumnya tahun 2021, 2020, dan 2019 sebagai berikut:

#### PNBP ASET

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	PNBP Aset	2019	49.142.167.172	55.185.370.156	112,29%
2.	PNBP Aset	2020	5.336.100.000	3.717.185.735	70%
3.	PNBP Aset	2021	6.006.000.000	6.259.167.351	104,21%
4.	PNBP Aset	2022	6.300.000.000	7.198.866.440	114,27%

#### PNBP BEA LELANG

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BEA LELANG	2019	8.144.463.482	6.233.648.493	76,5%
2.	BEA LELANG	2020	8.827.000.000	7.816.527.453	89%
3.	BEA LELANG	2021	11.635.000.000	10.749.304.107	92,38%
4.	BEA LELANG	2022	18.305.000.000	20.393.163.290	111.41%

#### POKOK LELANG

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	POKOK LELANG	2019	190.690.000.000	178.514.328.269	93,61%
2.	POKOK LELANG	2020	242.577.000.000	211.826.973.319	87%
3.	POKOK LELANG	2021	249.000.000.000	304.344.064.566	122,23%
4.	POKOK LELANG	2022	402.500.000.000	453.432.212.088	112,65%

#### PNBP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BIAD PPN	2019	85.990.166	118.772.991	138,12%
2.	BIAD PPN	2020	38.000.000	102.359.724	249%
3.	BIAD PPN	2021	38.000.000	7.590.195	19,97%
4.	BIAD PPN	2022	13.450.000	13.054.697	97,06%

**PIUTANG NEGARA DAPAT DISELESAIKAN (PNDS)**

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	PNDS	2019	984.668.228	1.340.065.186	136,09%
2.	Penyelesaian Outstanding tahun 2016 ke Bawah	2020	148.735.388	150.116.245	101%
3.	Penyelesaian Outstanding tahun 2017 ke Bawah	2021	884.628.832	1.130.552.249	127,8%
4.	Penyelesaian Outstanding	2022	301.700.000	709.839.418	235,28%

**BKPN YANG DAPAT DISELESAIKAN**

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BKPN SELESAI	2019	15	24	160%
2.	BKPN SELESAI	2020	15	22	147%
3.	BKPN SELESAI	2021	30	31	103,33%
4.	BKPN SELESAI	2022	30	30	100%

**B. ANALISIS KINERJA**

1. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan **Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara**

**a. Isu Utama dan Implikasi**

- 1) Capaian penerimaan PNBPN Q4 BMN 114,27%.
- 2) Terdapat perubahan target tahunan jumlah NUP perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2022 yang semula 538 NUP menjadi 534 NUP, perhitungan optimalisasi BMN Tahun 2021 sebanyak 29 NUP dan perhitungan optimalisasi BMN tahun 2020 sebanyak 105 NUP Target IKU Bidang tanah yang disertifikatkan dari 19 bidang tanah sudah terealisasi 25 bidang tanah dengan status P4 (Sudah terbit SHP).  
Sehingga target tercapai sebesar 131% .
- 3) Telah dilakukan survey dan penghitungan terhadap 69 NUP BMN yang menjadi target evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) di tahun 2022 dan menerbitkan rekomendasi terhadap hasil evaluasi kinerja BMN tahun 2020 dan 2021 sebanyak 189 NUP.

- 4) Sampai dengan Q4 tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara telah dilakukan sebanyak 91,07% baik dari persetujuan yang terbit pada Semester II Tahun 2021 maupun Semester 1 Tahun 2022.

**b. Akar Masalah**

- 1) Potensi pemanfaatan BMN terbatas dan beberapa persetujuan pengelolaan BMN belum ditindaklanjuti.
- 2) Terdapat beberapa nup yang dilakukan reklasifikasi sehingga tidak menjadi objek SBSK.
- 3) Terdapat banyak BMN berupa rumah negara dalam kondisi tidak berpenghuni/dihuni tidak sesuai dengan ketentuan.
- 4) Terdapat perubahan Penetapan Lokasi yang menyebabkan tidak semua bidang tanah pada Satuan Kerja KSOP Kelas II Patimban dapat dilaksanakan pada tahun 2022, karena terkendala ketersediaan dana pada Kantor Pertanahan. Atas sisa bidang tanah tersebut akan menjadi target tahun 2023.
- 5) Terdapat persetujuan pemanfaatan yang tidak ditindaklanjuti karena dianggap terlalu tinggi nilai sewanya.
- 6) Terdapat satker yang belum memahami tata cara pengajuan lelang BMN secara online sehingga persetujuan yang sudah diterbitkan tidak ditindaklanjuti dan telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam surat persetujuan.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- 1) Penggalan potensi pemanfaatan ke satuan kerja (sosialisasi offline dan online).
- 2) Koordinasi dan melakukan wasdal atas persetujuan pengelolaan yang telah terbit.
- 3) Melanjutkan survei lapangan dalam rangka pendataan BMN yang menjadi target tingkat kesesuaian SBSK 2022 wilayah Kab. Karawang.
- 4) Verifikasi dan penghitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2022 dan penghitungan optimalisasi penggunaan BMN dengan SBSK periode tahun 2020 dan 2021.
- 5) Koordinasi dengan satker terkait target.
- 6) Melakukan perhitungan evaluasi kinerja BMN.
- 7) Membuat Laporan evaluasi kinerja dan rekomendasi kinerja BMN.
- 8) Koordinasi dan wasdal ke satker yang telah mendapat persetujuan baik penjualan maupun pemanfaatan.

#### **d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- 1) Penggalian potensi pemanfaatan dan penjualan BMN ke satuan kerja (sosialisasi offline dan online) termasuk satker BLU (UNSIKA).
- 2) Koordinasi dan melakukan wasdal atas persetujuan pengelolaan yang telah terbit.
- 3) Melakukan sosialisasi tentang SBSK kepada satuan kerja yang menjadi target pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian SBSK dengan BMN tahun 2023.
- 4) Melakukan survei lapangan dalam rangka pendataan BMN yang menjadi target.
- 5) Rapat antara KPKNL Purwakarta, Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja yang menjadi target sertifikasi tahun 2023 dengan mengundang Kanwil DJKN Jawa Barat.
- 6) Koordinasi dengan satker-satker target sertifikasi agar segera menyerahkan dokumen pemberkasan baik sertifikasi murni maupun BBSK bagi yang belum menyerahkan.
- 7) Verifikasi dan validasi data BMN berupa tanah yang ada pada satker.
- 8) Mengirimkan surat permintaan data sekunder kepada BPS di wilayah kerja KPKNL Purwakarta.
- 9) Membuat SK Tim Evaluasi Kinerja BMN.
- 10) Koordinasi dan wasdal ke satker yang telah mendapat persetujuan baik penjualan maupun pemanfaatan.
- 11) Sosialisasi Pengelolaan BMN.

## **2. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Bidang Piutang Negara**

### **a. Isu Utama dan Implikasi**

- 1) Capaian penerimaan PNBPN Q4 Piutang Negara terealisasi 97,06%.
- 2) Capaian penurunan outstanding piutang negara berasal dari optimalisasi BKPN yang tidak didukung dengan barang jaminan dengan penerbitan PSBDT, pelunasan tanpa keringanan dan pelunasan melalui keringanan Crash Program, serta angsuran hutang.

### **b. Akar Masalah**

- 1) Penanggung Hutang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang.
- 2) Tingkat kemampuan Penanggung Hutang yang rendah sehingga mempengaruhi potensi penerimaan PNBPN.
- 3) Target penurunan outstanding piutang negara adalah penurunan nilai outstanding piutang negara yang sebagian besar merupakan BKPN dimana Penanggung Hutang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang serta tingkat kemampuan Penanggung Hutang yang rendah.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- 1) Intensifikasi Crash Program Keringanan Hutang sekaligus penagihan secara langsung, membuat panggilan/himbauan penyelesaian hutang.
- 2) Mengupayakan crash program keringanan hutang oleh Pihak Ketiga.
- 3) Penyitaan barang jaminan an. KSU Mitra Sejahtera, pemeriksaan barang jaminan yang direncanakan untuk lelang dan permintaan Penilaian Barang Jaminan untuk proses lelang.
- 4) Penerbitan PSBDT BKPN penyerahan DJKN Eks BPPN dan Pemprov Jabar/BJBS.
- 5) Intensifikasi Crash Program Keringanan Hutang sekaligus penagihan secara langsung, membuat panggilan/himbauan penyelesai hutang.
- 6) Penyitaan, pemeriksaan barang jaminan dan permintaan penilaian Barang Jaminan untuk proses lelang.
- 7) Mengupayakan crash program keringanan hutang oleh Pihak Ketiga.
- 8) Penyitaan barang jaminan an. KSU Mitra Sejahtera, pemeriksaan barang jaminan yang direncanakan untuk lelang dan Penilaian Barang Jaminan untuk selanjutnya proses lelang.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- 1) Membuat surat panggilan/himbauan penyelesaian hutang kepada semua Penanggung Hutang.
- 2) Penyampaian Surat Paksa BKPN penyerahan dari DJKN dan Kominfo sekaligus penelitian lapangan.
- 3) Clustering/profiling BKPN per Januari 2023.
- 4) Koordinasi dan sosialisasi dengan Pemda/RSUD.
- 5) Membuat Surat Panggilan/himbauan kepada Penanggung Hutang/Pemilik barang jaminan.
- 6) Penagihan langsung sekaligus penyampaian Surat Paksa BKPN penyerahan dari DJKN dan Kominfo.
- 7) Membuat surat permohonan pembatasan pelayanan publik sesuai PP No. 28 Tahun 2022.
- 8) Membuat surat ke Disdukcapil tentang informasi Debitur yang belum diketahui keberadaannya.
- 9) Penelitian lapangan dalam rangka penerbitan PSBDT.

### 3. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan **Bidang Penilaian**

#### a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Pada Triwulan IV 2022 terdapat 11 (sebelas) permohonan penilaian BMN yang seluruhnya digunakan oleh pengelola dalam memberikan persetujuan pengelolaan BMN atau deviasi ketergunaan hasil penilaian 0%.
- 2) Index Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian menurun (membaik) jika dibandingkan dengan Index Triwulan IV sebesar 0,56% menjadi 0,39%.

#### b. Akar Masalah

- 1) Kesalahan penilai dalam memahami tarif usulan sewa yang disampaikan Pemohon dalam dokumen permohonan sewa.

#### c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Mengoptimalkan kegiatan peer review.
- 2) Mempertimbangkan tarif usulan sewa yang diajukan oleh pemohon dalam melakukan analisis perhitungan nilai tanpa mengabaikan independensi penilai.
- 3) Meninjau kembali hasil penilaian apabila hasil penilaian lebih rendah dari nilai limit yang diajukan, dengan memperluas cakupan objek pembandingan.

#### d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Melakukan koordinasi dengan seksi PKN terkait tarif usulan sewa dalam dokumen permohonan sewa.

### 4. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan **Bidang Lelang**

#### a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Capaian penerimaan PNBQ Q4 Lelang terealisasi 111,41%.
- 2) Banyaknya lelang TAP.
- 3) Masih banyaknya masyarakat yang belum paham terkait mengikuti lelang melalui website lelang.go.id.
- 4) Realisasi pokok lelang terealisasi diatas target karena adanya lelang eksekusi pailit dan beberapa lelang eksekusi HT yang laku dengan nilai cukup besar.

#### b. Akar Masalah

- 1) Kondisi ekonomi yang belum stabil, dan adanya beberapa obyek lelang yang masih dihuni oleh Debitur menjadi salah satu penyebab masih banyaknya lelang TAP.
- 2) Kebijakan pemohon lelang terkait penurunan nilai limit dimana memerlukan beberapa kali lelang untuk sampai pada nilai likuidasi.

- 3) Beberapa obyek lelang yang masih dihuni oleh debitur menyebabkan calon pembeli memerlukan biaya dan waktu lebih apabila menjadi pemenang lelang terkait pengosongannya.
- 4) Banyaknya obyek lelang yang kurang marketable.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- 1) Koordinasi dan penggalan potensi lelang ke pelaku UMKM, Satuan Kerja, dan Perbankan.
- 2) Melaksanakan lelang UMKM di bulan Oktober, November, Desember 2022.
- 3) Melakukan sosialisasi melalui medsos KPKNL terkait pembuatan akun lelang, penyebarluasan obyek lelang, dan tata cara mengikuti lelang.
- 4) Berkoordinasi dengan perbankan untuk mengatur pertemuan dengan nasabah prioritas.
- 5) Memberikan Reward kepada pemohon lelang terutama Perbankan yang tingkat permohonan dan laku terjualnya mencapai 36%.
- 6) Melakukan evaluasi atas obyek lelang yang dilelang lebih dari 3x dengan nilai limit yang sama namun tidak laku terjual.
- 7) Melaksanakan lelang UMKM di bulan Oktober, November, Desember 2022.
- 8) Melakukan sosialisasi melalui medsos KPKNL terkait pembuatan akun lelang, penyebarluasan obyek lelang, dan tata cara mengikuti lelang.
- 9) Koordinasi dengan para stakeholder terkait pengajuan permohonan lelang dengan memprioritaskan obyek lelang yang memiliki potensi laku.
- 10) Melakukan penggalan potensi lelang ke Pemda Subang, Pemda Karawang serta ke para pelaku UMKM di wilayah Purwakarta, Subang, Karawang.
- 11) Melakukan koordinasi dengan stakeholder selain Perhutani dalam rangka pelaksanaan lelang secara online melalui website lelang.go.id.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- 1) Melelang barang jaminan debitur 1 M.
- 2) Membuat surat permohonan pembatasan tindakan pelayanan publik kepada Instansi berwenang untuk debitur 1 M ke atas.
- 3) Koordinasi dan penggalan potensi lelang ke Kejaksaan di wilayah Subang, Karawang, Purwakarta.
- 4) Koordinasi dan penggalan potensi lelang ke pelaku UMKM di wilayah Purwakarta dan rumah BUMN Purwakarta.
- 5) Melaksanakan lelang UMKM di triwulan I.
- 6) Secara rutin menayangkan melalui medsos terkait cara mengikuti lelang melalui website lelang.go.id.

- 7) Melaksanakan lelang UMKM di Triwulan I Tahun 2023.
- 8) Melakukan koordinasi dengan stakeholder selain Perhutani dalam rangka pelaksanaan lelang secara online melalui website lelang.go.id.

#### 4. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan **Bidang Kepatuhan Internal**

##### **a. Isu Utama dan Implikasi**

- 1) Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16.  
Nilai Pemenuhan = Nilai akhir (total Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil) berdasarkan hasil penilaian TPK  
Realisasi nilai capaian sebesar 92,44 dari target 75.

##### **b. Akar Masalah**

-

##### **c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- 1) Melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 terhadap pengungkit dan survei persepsi anti korupsi.
- 2) Melakukan pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta edukasi pengelolaan kinerja.
- 3) Menyampaikan materi FGD yang sudah ditentukan Setjen Kemenkeu pada kesempatan pertama setelah pelaksanaan Preliminary FGD Pejabat Administrator, agar seluruh pegawai memahami materi FGD serta aktif dalam diskusi.

##### **d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- 1) Melanjutkan kegiatan/dokumentasi sesuai LKE untuk persiapan WBBM pada tahun 2024.
- 2) Melakukan perencanaan kinerja dan penyusunan perjanjian kinerja berikut pendokumentasiannya.
- 3) Melaksanakan FGD segera setelah Preliminary FGD Pejabat Administrator.

## 5. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan **Bagian Umum**

### a. **Isu Utama dan Implikasi**

- 1) Dari total jumlah pegawai 32 orang, 32 pegawai telah mencapai lebih dari 24 JP dalam program-program pengembangan kompetensi sehingga melebihi kriteria pengukuran SDM yang kompeten.
- 2) Belum ada Aplikasi Monitoring keikutsertaan Pegawai dalam program pengembangan kompetensi sehingga data yang direkapitulasi belum mencerminkan keseluruhan potensi yang sesungguhnya.
- 3) IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).
- 4) Aplikasi yang masih dalam proses penyempurnaan.
- 5) Terhambatnya proses Updating DBR (Daftar Barang Ruangan) karena perpindahan BMN tanpa pemberitahuan.
- 6) Adanya keterlambatan hasil Penilaian BMN atas rencana penghapusan.
- 7) Akurasi penandaan BMN yang masih harus diteliti Kembali.
- 8) Penertiban dan pengawasan BMN berupa tanah rumah negara yang terhambat mengingat tidak adanya biaya pemeliharaan atas tanah tersebut.

### b. **Akar Masalah**

- 1) Belum ada aplikasi monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi.
- 2) Informasi pelatihan di aplikasi SEMANTIK hanya dapat diakses oleh Pegawai yang bersangkutan.
- 3) Aplikasi SIMAN dan SAKTI, maupun E-Prime Aset yang menjadi sumber utama bahan pelaporan masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga pelaporan dimungkinkan terlambat.
- 4) Perpindahan BMN dari beberapa ruangan tidak dilaporkan terlebih dahulu oleh pegawai.
- 5) Volume/intensitas yang tinggi para Penilai mengakibatkan permohonan penilaian BMN untuk penghapusan tertunda.
- 6) Ditemukan BMN berupa inventaris kantor yang belum sesuai dengan penandaannya.
- 7) Adanya peraturan yang tidak mengizinkan munculnya biaya pemeliharaan atas tanah untuk rumah negara.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- 1) Memberi pengetahuan pada para Pegawai tentang berbagai program pengembangan kompetensi.
- 2) Mendorong kesadaran diri pegawai untuk mengembangkan kompetensi dengan mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi, termasuk salah satunya melalui e-learning melalui KLC.
- 3) Meneruskan informasi pelaksanaan program pengembangan kompetensi melalui media komunikasi yang tersedia.
- 4) Menginventarisir keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi secara manual.
- 5) Melakukan pengawasan berjenjang terhadap kegiatan.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap bulan.
- 7) Meningkatkan koordinasi dengan seksi teknis.
- 8) Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran.
- 9) Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari: A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA), Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan B. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain 1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); 2. foto; 3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); 4. batas dan GPS; 5. fasilitas; dan 6. konstruksi. "

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- 1) Meneruskan informasi dan mendorong pegawai untuk mengikuti webinar/lokakarya, dan sebagainya.
- 2) Membuat usulan pembuatan Aplikasi Monitoring Keikutsertaan Pegawai dalam Program Pengembangan Kompetensi.
- 3) Melanjutkan Tindakan yang telah dilaksanakan, diantaranya: rapat monev pelaksanaan anggaran, output dan RPD.
- 4) Revisi anggaran dan RPD.

- 5) Updating RK BMN Mengusulkan belanja modal project selection 2026 Merealisasikan belanja modal sesuai timeline yang ditetapkan di triwulan I Tahun 2023.

### C. REALISASI ANGGARAN

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya pada KPKNL Purwakarta dalam rangka pembinaan dikepegawaian, berdasarkan data dan usulan ke Kantor Pusat per 31 Desember 2022, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Kenaikan pangkat : 4 orang
- b. Kenaikan Gaji Berkala : 24 orang
- c. Ijin belajar : 1 orang
- d. Pegawai pensiun : 2 orang
- e. Pegawai mengikuti diklat : 32 orang

Tahun Anggaran 2022 KPKNL Purwakarta mendapat alokasi anggaran awal sebesar **Rp. 1.939.882.000,00** (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai	: Rp.	0,00
Belanja Barang	: Rp.	1.939.882.000,00
Belanja Modal	: Rp.	0,00

Rincian realisasi belanja:

Belanja Pegawai	: Rp.	0,00
Belanja Barang	: Rp.	1.776.537.724,00
Belanja Modal	: Rp.	0,00
Total realisasi	: Rp.	1.673.691.420,00

Anggaran yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Purwakarta sebagai berikut:

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian
<b>A)</b>	<b>Nilai IKPA</b>		<b>100%</b>
	1.	Revisi DIPA	100%
	2.	Devisi Halaman III DIPA	100%
	3.	Penyerapan Anggaran	100%
	4.	Belanja Kontraktual	100%
	5.	Penyelesaian Tagihan	100%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	99,98%
	7.	Dispensasi SPM	100%
	8.	Capaian Output	100%
<b>B)</b>	<b>Nilai SMART</b>		<b>92,92%</b>
<b>Capaian Triwulan IV</b>			<b>95,75%</b>

## D. INOVASI

### 1. Cluster Pusaka

Merupakan laman web sederhana berbasis google site yang menyediakan informasi layanan KPKNL Purwakarta, pengajuan layanan pengelolaan BMN secara online, dan Tracking Progres permohonan layanan BMN yang dapat diakses oleh pengguna jasa melalui tautan: [s.id/kpknlpwk](http://s.id/kpknlpwk).

#### **Latar Belakang:**

Kebutuhan pengguna jasa untuk mendapatkan informasi layanan KPKNL yang lebih jelas dan mudah diakses oleh pengguna jasa khususnya mengenai jenis dan persyaratan dokumen, pengajuan permohonan layanan dan progres penanganan layanan.

#### **Tujuan:**

Meningkatkan kepuasan pengguna jasa dengan menyediakan alat bantu yang dapat memudahkan para pengguna jasa untuk mengakses informasi terkait layanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta.

#### **Jenis Inovasi:**

Aplikasi berbasis Google Site yang dapat diakses oleh pengguna jasa secara online.

### 2. Podcast Kanal On Air (Podcast Informatif Seputar Kekayaan Negara dan Lelang via Chanel Youtube.com)

Merupakan sarana penyampaian informasi kepada publik dengan media kekinian, santai namun tetap informatif dan akuntabel.

#### **Latar Belakang:**

Penyampaian informasi tugas dan fungsi pokok KPKNL Purwakarta di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pelayanan Lelang kepada masyarakat sangat diperlukan sebagai bagian dari fungsi layanan dan keterbukaan informasi dengan model penyampaian yang dinilai mampu menjangkau pengguna layanan dan umumnya masyarakat secara lebih luas dengan media online yang populer.

#### **Tujuan:**

Memberikan informasi tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta sebagai instansi vertikal DJKN dengan kemasan kekinian, informatif dan akuntabel.

#### **Jenis Inovasi:**

Podcast Kanal On Air dan video kegiatan.

### 3. Talk To Me

Sarana Pengaduan berbasis elektronik melalui scan barcode.

#### **Latar Belakang:**

Adanya kebutuhan untuk mengakomodir pengaduan/saran dari pengguna layanan.

**Tujuan:**

Sarana evaluasi dalam upaya meningkatkan perbaikan pelayanan KPKNL Purwakarta kepada pengguna layanan.

**Jenis Inovasi:**

Sarana pengaduan berbasis elektronik melalui scan barcode yang ditindaklanjuti dengan telepon/wa/email.

**4. Moncaki (Monitoring Capaian Kinerja)**

Merupakan aplikasi berbasis google sheet dan google data studio yang menyediakan informasi Capaian Kinerja Unit KPKNL Purwakarta yang dapat diakses secara online oleh Pimpinan maupun oleh seluruh Pegawai KPKNL Purwakarta.

**Latar Belakang:**

Kebutuhan pimpinan KPKNL Purwakarta untuk mendapatkan informasi Capaian Kinerja KPKNL Purwakarta yang dapat diakses secara online dan kebutuhan seksi Kepatuhan Internal untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan capaian kinerja. Memberikan informasi capaian kinerja kepada Pimpinan dan seluruh pegawai KPKNL Purwakarta .

**Tujuan:**

Sebagai alat bantu Seksi Kepatuhan Internal dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja kepada Kanwil dan Kantor Pusat DJKN.

**Jenis Inovasi:**

Aplikasi berbasis Google Sheet dan Google Data Studio.

**5. Pendato (Pendataan Pegawai WFH/WFO)**

Merupakan aplikasi berbasis google sheet yang berfungsi untuk mendata pegawai yang akan melaksanakan WFH (Work From Home) atau WFO (Work From Office).

**Latar Belakang:**

Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor SE-14 tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali 3.

Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-12/MK.1/2021 tentang Penegasan Kembali Ketentuan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan

Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND- 994/SJ/2021 tanggal 4 Juli 2021 hal Penegasan Pembatasan Bepergian dan Cuti serta Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

**Tujuan:**

Mempermudah pembagian komposisi pegawai WFH dan WFO dan pengajuan usulan pegawai WFH secara kolektif oleh Sub bagian umum.

Memperoleh data untuk Laporan Harian Monitoring Kondisi Pegawai ke Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Jawa Barat.

Sebagai alat bantu pimpinan dalam monitoring pegawai WFH/WFO.

**Jenis Inovasi:**

Aplikasi berbasis Google Sheet.

**6. Monik PPNPM (Monitoring Kehadiran Pegawai PPNPM)**

Merupakan aplikasi berbasis google Form yang berfungsi untuk Monitoring Pendataan kehadiran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) secara digital melalui Google Forms (MONIK PPNPN).

**Latar Belakang:**

Dalam rangka menjalankan protokol kesehatan dan menghindari kontak langsung, maka presensi tidak dapat dilakukan melalui mesin presensi dengan sijek jari, sedangkan belum adanya fitur pada presensi yang digunakan Aparat Sipil Negara untuk PPNPN, maka perlu dibuatkan presensi digital yang memadai bagi PPNPN KPKNL Purwakarta agar dapat menjadi bentuk akuntabilitas kehadiran.

**Tujuan:**

Menyediakan alat bantu presensi digital yang memadai bagi PPNPN KPKNL Purwakarta agar dapat menjadi bentuk akuntabilitas kehadiran serta sebagai alat bagi pimpinan dalam Monitoring kedisiplinan PPNPM.

**Jenis Inovasi:**

Aplikasi berbasis Google Form.

**7. Sapa Pagi Senin**

Kegiatan rutin untuk menguatkan nilai-nilai kementerian keuangan dan bertukar informasi antar pegawai serta evaluasi kegiatan.

**Latar Belakang:**

Adanya kebutuhan untuk media penanaman nilai-nilai Kementerian Keuangan, budaya kerja Kementerian Keuangan dan kode etik/kode perilaku ASN, sharing session pengetahuan baik terkait tugas pokok dan fungsi maupun pengetahuan lain yang bermanfaat bagi pegawai serta sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas setiap minggu.

**Tujuan:**

Meningkatkan pemahaman dan pembiasaan pegawai akan nilai2/budaya Kemenkeu serta hak dan kewajiban ASN, serta meningkatkan kompetensi pegawai.

**Jenis Inovasi:**

Kegiatan Sapa Pagi Senin melalui pertemuan secara daring media zoom meeting.

## E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2022



Penghargaan IKPA peringkat I Pagu Kecil dari KPPN Purwakarta Q1 tahun 2022



Penghargaan IKPA peringkat I Pagu Kecil dari KPPN Purwakarta Q2 tahun 2022



Penghargaan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran nilai sempurna dari Kanwil DJPb Jabar semester 1 2022



Penghargaan KPKNL Purwakarta sebagai unit kerja berpredikat ZI-WBK Tahun 2022 dari Menteri Keuangan RI



Penghargaan ajang Grandprix Penilaian Tahun 2022 Kategori Lomba Foto Semarak Kemerdekaan RI ke-77 dari Direktorat Penilaian DJKN



Penghargaan Juara III Video Pendek Hari Kekayaan Negara Tahun 2022 dari Dirjen Kekayaan Negara

## **BAB IV PENUTUP**

KPKNL Purwakarta yang beralamat di Jalan Siliwangi No 9 Kab. Purwakarta merupakan unit vertikal DJKN Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dalam rangka mendukung visi dan misi DJKN sebagai pengelolaan kekayaan Negara. Dengan wilayah kerja meliputi 3 Kabupaten yaitu Purwakarta, Karawang, Subang.

KPKNL Purwakarta telah melakukan yang terbaik dalam usaha memenuhi target pada indikator-indikator tersebut dengan inovasi-inovasi yang di buat. Perencanaan dan strategi-strategi dibahas pimpinann dengan seluruh pegawai maupun dengan stakeholder untuk baik dengan Dialog Kinerja Organisasi maupun dengan Focus Grup Diskusi, sosialisasi baik melalui zoom maupun offline.

Secara umum pada Tahun 2022 KPKNL Purwakarta telah mencapai prestasi kerja yang sangat baik dan untuk target PNBK Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dilakukan addendum kontrak kinerja khususnya PNBK Lelang dan Target Pokok Lelang pada semester 2 tahun 2022 karena telah mencapai target di semester 1 tahun 2022. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2022 tercapai sebesar **111,81%**. Keseluruhan target yang telah ditetapkan melalui Indikator-indikator kinerja utama telah mencapai realisasi sesuai atau bahkan melampaui target dan beberapa penghargaan yang didapat juga merupakan dedikasi yang tinggi dari pegawai KPKNL Purwakarta.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta juga membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk eksternal maupun internal KPKNL Purwakarta yaitu Percepatan SOP, Aplikasi Cluster Pusaka Inovasi dalam pemberian layanan berbasis elektronik berupa permohonan online pengelolaan BMN, Podcast/Youtube, Talk To Me Sarana Pengaduan, Aplikasi Moncaki, Aplikasi Monitoring Capaian Kinerja, Aplikasi Pendato, Aplikasi Pendataan WFH WFO pegawai, Aplikasi Monik PPNPN, Aplikasi kehadiran pegawai PPNPN secara digital, Sapa Pagi Senin

Pada Tahun 2022 ini KPKNL Purwakarta juga mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, hal ini dibangun bersama baik internal pegawai KPKNL Purwakarta dengan seluruh stakeholder pada KPKNL Purwakarta serta arahan dan bimbingan dari Kantor Pusat DJKN maupun dari Kanwil DJKN Jawa Barat serat beberapa penghargaan terkait pelaksanaan anggaran dan foto dan video publikasi kegiatan.

Dengan tetap menjaga nilai-nilai kementerian keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinegi, Pelayanan dan Kesempurnaan serta menjalankan moto KPKNL Purwakarta yaitu "BAIK", Bersih, Akuntabel, Inovatif, Konsisten, kami optimis dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.